



RENCANA KERJA 2020  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BERAU



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb 77311 Kabupaten Berau – Provinsi Kaltim

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2020.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Februari 2019

*Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Berau  
Kepala,*

**Drs. SUSILA HARJAKA**  
Pembina Utama Muda / IVc  
Nip. 19620526198803 1 006

# Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| <b>BAB I</b> .....  | 1  |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....  | 1  |
| 1.1 Kondisi Kepegawaian .....   | 3  |
| 1.2 Latar Belakang.....   | 4  |
| 1.3 Landasan Hukum .....  | 7  |
| 1.4. Maksud Dan Tujuan.....   | 8  |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....  | 9  |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019</b> .....   | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan Capaian<br>Renstra .....                     | 10 |
| <b>BAB III TUJUAN, SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....   | 12 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....   | 12 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.....   | 14 |
| 3.3. Program Dan Kegiatan .....   | 15 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 17 |
| Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Berau Tahun 2020 merupakan bentuk penjabaran<br>tahunan dari Renstra 2017 - 2021 ..... | 17 |

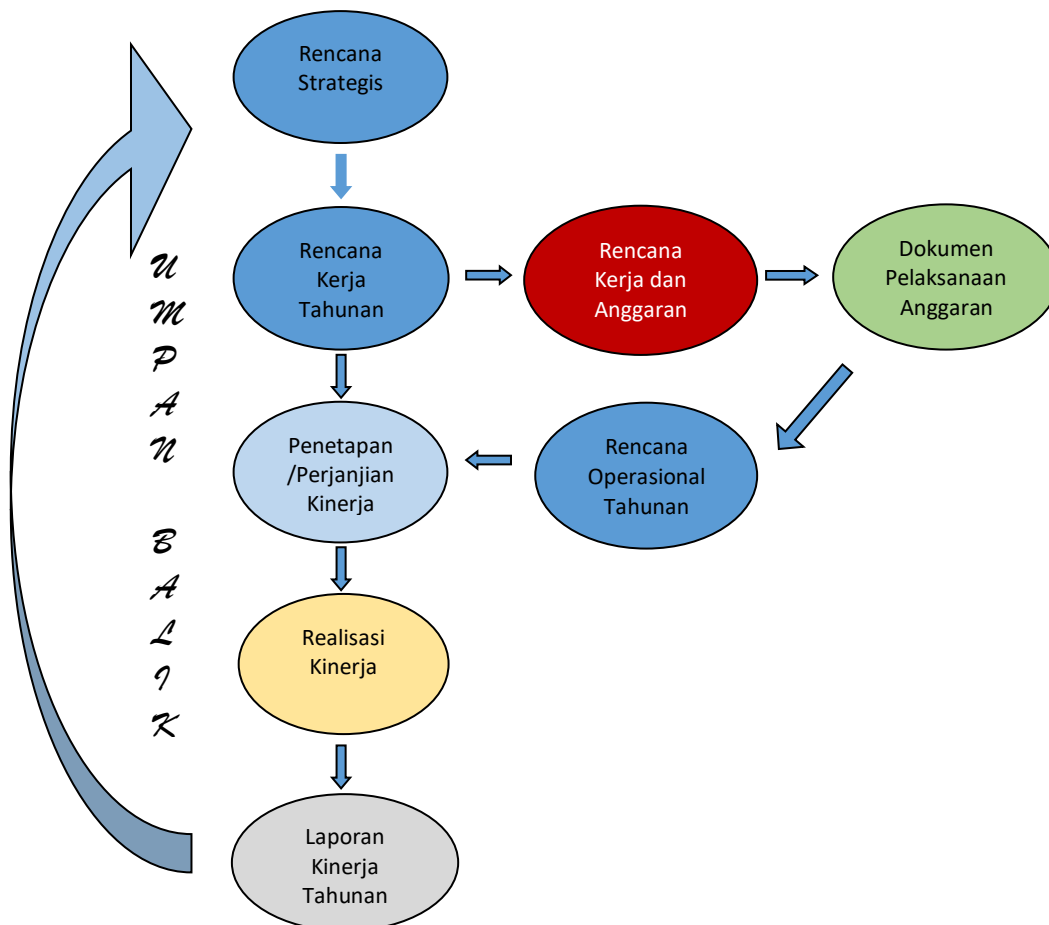


# BAB I

## PENDAHULUAN

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Gambar 1.1



Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra selanjutnya, diidentifikasi sasaran mana yang akan di wujudkan pada tahun 2018 beserta indikatornya dan rencana tingkat capaiannya targetnya.

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan antasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informasi dan hubungan masyarakat; Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan sarana komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat; melaksanakan pelayanan teknis administrasi Dinas;

dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkannya Peraturan Bupati No.64 tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau:

### **1.1 Kondisi Kepegawaian**

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki pegawai sebanyak 44 orang Aparatur Sipil Negara. Dari jumlah pegawai sebanyak 44 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 12 orang dan Kepala Sub. Bagian (Eselon VI b) sebanyak 3 orang serta pelaksana sebanyak 24 orang.

Tabel 1.1  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian         | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Jumlah |
|----|----------------|-----------|------------|-----------|------|--------|
| 1  | Kepala Dinas   | 1         |            |           |      | 1      |
| 2  | Sekretaris     |           | 1          |           |      | 1      |
| 3  | Kepala Bidang  |           | 4          |           |      | 4      |
| 4  | Kepala Seksi   |           |            | 12        |      | 12     |
| 5  | Kepala Sub.Bag |           |            | 3         |      | 3      |
| 6  | Staf           |           |            |           | 21   | 21     |
|    | Jumlah         | 1         | 5          | 15        | 21   | 42     |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berdasarkan yang di miliki, dapat di lihat table 1.2.

Tabel 1.2

## Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

| No | Uraian         | S2     | S1      | D3     | SLTA    | SLTP   | Jumlah |
|----|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 1  | Kepala Dinas   |        | 1       |        |         |        | 1      |
| 2  | Sekretaris     |        | 1       |        |         |        | 1      |
| 3  | Kepala Bidang  | 1      | 3       |        |         |        | 4      |
| 4  | Kepala Seksi   | 2      | 12      |        |         |        | 14     |
| 5  | Kepala Sub.Bag | 1      | 1       | 1      |         |        | 3      |
| 6  | Staf           |        | 6       |        | 12      | 1      | 19     |
|    | Jumlah         | 4      | 24      | 1      | 12      | 1      | 42     |
|    | %              | 9,52 % | 57,14 % | 2,38 % | 28,57 % | 2,38 % | 100 %  |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, sebanyak 4 orang (9,52) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 24 orang (57,14%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2,38%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 12 orang Staff (28,57%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 Orang yaitu Staff (2,38%).

## 1.2 Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun sistem Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dengan melalui visi dan misinya sebagai berikut:

## **A. Visi Kabupaten Berau**

*“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”*,

## **B. Misi Kabupaten Berau**

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Visi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 yaitu *“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”* dalam RPJMD tahun 2016-2021, Sehingga Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Baplitbang Kabupaten Berau melakukan strategi dan program-program dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi: *“Baplitbang Perencanaan Terpadu Pembangunan Bermutu”*.

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menjembatani memberikan pelayanan

Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### **1.3 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2020 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perpres No.29 Tahun 2014 Tentang SAKIP
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang 7 Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2010 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Bupati No.64 tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah dalam rangka melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah:

- 1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2020.
- 2) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### - BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan Renja.

### - BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra.

### - BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, sasaran Renja SKPD, Program, dan Kegiatan

### - BAB IV Penutup

Berisi Kesimpulan dari rencana kinerja tahunan

### - Lampiran

Berisi Lampiran Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2020, dan lampiran lainnya.

## **BAB II**

### **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan Capaian Renstra**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 telah melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

➤ Urusan Wajib

- Program Pelayanan Administrasi:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  7. Penyediaan alat tulis kantor
  8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  12. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  13. Penyediaan makanan dan minuman
  14. Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  15. Rapat , Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
  16. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  2. Sosialisasi Program Kinerja OPD

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
  4. Monitoring dan Evaluasi
- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
    1. Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian
  - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
    1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
    2. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
    3. Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik.
    4. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik.
    5. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau
    6. Pengelolaan Media Sosial
  - Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
    1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:
    1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika
    2. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika
  - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
    1. Penyusun dan Pengumpulan Data dan Statistik Sektorial
- Terhadap urusan tersebut akan dievaluasi dapat dilihat pada gambar matrix 2.1 yang terdapat pada lampiran.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mendukung program nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Standar Pelayanan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika SPM KOMINFO Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Indeks Kinerja Kunci (IKK) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Berdasarkan Peraturan Bupati No.64 tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

➤ Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- Kepala Dinas
- Sekretaris, membawahi:
  - a. Kasubbag Penyusunan Program
  - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - c. Kasubbag Keuangan dan Aset
- Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Membawahkan:
  - a. Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik
  - b. Kasi Pengelolaan Informasi Publik
  - c. Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kabid Penyelenggaraan E-Government, Membawahkan:
  - a. Kasi Infrastruktur dan Teknologi
  - b. Kasi Pengembangan Aplikasi
  - c. Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika, Membawahkan:
  - a. Kasi Kehumasan dan Layanan Informasi
  - b. Kasi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan public
  - c. Kasi Tata Kelola E-Government
- Kabid Persandian dan Statistik, Membawahkan:
  - a. Kasi Tata Kelola Persandian
  - b. Kasi Operasional Pengamanan Persandian
  - c. Kasi Statistik

➤ Pelaksanaan Teknis Dinas

- Tugas Pokok:  
Melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
- b. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, dan Bidang Persandian dan Statistik.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi Penyusunan Program serta administrasi Keuangan dan Aset.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

- mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan sinergitas pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Berau.
  - b. Menciptakan kolektivitas pendayagunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Berau.
  - c. Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
  - d. Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - e. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
  - f. Mewujudkan terlaksananya keterbukaan informasi publik.

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai, adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang sesuai dengan norma dan standar kualitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Tersedianya prosedur dan tata kerja komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
  - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
  - Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - Sosialisasi Program Kinerja OPD
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
  - Monitoring dan Evaluasi

- d. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
  - Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian
- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media massa
  - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
  - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik
  - Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau
  - Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
  - Pengelolaan Media Sosial
- f. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
  - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika
  - Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika
- h. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - Penyusun dan Pengumpulan Data dan Statistik SektorSebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Berau Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021, maka dapat di lihat pada Tabel 3.3 yang ada di lampiran laporan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Berau Tahun 2020 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Renstra 2017 - 2021**

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana kinerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2017 – 2021)

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan adanya evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kabupaten Berau merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini maka Diskominfo Kabupaten Berau harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kabupaten Berau dengan senantiasa

menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas Yang dibutuhkan Masyarakat baik yang berskala local, regional, dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Diskominfo tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk-produk teknologi informasi dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Kabupaten Berau.

Adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tanjung Redeb, Februari 2019

Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Berau  
Kepala,

**Drs. SUSILA HARJAKA**  
Pembina Utama Muda / IVC  
Nip.19620526198803 1 006

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021  
KABUPATEN BERAU**

| KODE      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja |        |  |               | Usulan Pagu Indikatif (2020)  |          | Prakiraan Maju (2021) | Jenis Prog & Kegiatan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |  |  |  |
|-----------|---|--------|-------------------|--------|--|---------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|
|           |   |        | Program/Outcome   |        | Kegiatan/Output  |               | Kegiatan  | program  |                       |                       |                                   |               |  |  |  |
|           |   |        | Uraian            | Target | Uraian   | Target        |   |          |                       |                       |                                   |               |  |  |  |
| 1         | 2   | 5      | 6                 | 7      | 8  | 9             | 10  | 11       | 12                    | 13                    |                                   |               |  |  |  |
| 2.10.2.10 | 01  | 01     |                   |        | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Tanjung Redeb | Persentase Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik                 | 100%     |                       |                       |                                   | 1,419.000.000 |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |
|           |   |        |                   | 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tanjung Redeb | Terlaksananya penyediaan kebutuhan belanja materai                        | 357 Lbr  | 5,000,000             |                       | 5.500.000                         |               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |  |
|           |   |        |                   | 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik                     | Tanjung Redeb | Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik      | 12 Bulan | 120,000,000           |                       | 156.000.000                       |               | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik                     |  |  |
|           |   |        |                   | 06     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tanjung Redeb | Jumlah kendaraan dinas  | 9 unit   | 150,000,000           |                       | 195.000.000                       |               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |  |  |
|           |   |        |                   | 07     | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Tanjung Redeb | Jumlah pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan, barang dan laporan | 8 orang  | 200,000,000           |                       | 260.000.000                       |               | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  |  |  |
|           |   |        |                   | 08     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Tanjung Redeb | Tersedianya jasa kebersihan kantor  | 1 Orang  | 40,000,000            |                       | 92.000.000                        |               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |  |  |
|           |   |        |                   | 09     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Tanjung Redeb | Jumlah Jenis Peralatan Kerja Dinas kominfo yang diperbaiki                | 20 unit  | 50,000,000            |                       | 65.000.000                        |               | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |  |  |

|  |  |  |    |  |               |  |  |  |               |             |  |             |  |  |
|--|--|--|----|--|---------------|--|--|--|---------------|-------------|--|-------------|--|--|
|  |  |  | 10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Tanjung Redeb |  |  | terpenuhinya kebutuhan ATK kantor                                    | 50 jenis      | 40,000,000  |  | 92.000.000  | Penyediaan alat tulis kantor                                     |  |
|  |  |  | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Tanjung Redeb |  |  | terpenuhinya barang cetakan penggandaan                              | 20.000 Lembar | 12,000,000  |  | 15,000,000  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |  |
|  |  |  | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan                   | 15 Jenis      | 20,000,000  |  | 46.000.000  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  |
|  |  |  | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan             | 15 Unit       | 120,000,000 |  | 156.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |  |
|  |  |  | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tanjung Redeb |  |  | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga                        | 4 Unit        | 2,000,000   |  | 2.000.000   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |
|  |  |  | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan        | Tanjung Redeb |  |  | Jenis bahan bacaan Berkaitan dengan Teknologi Informasi              | 3 Majalah     | 20.000.000  |  | 24.000.000  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan        |  |
|  |  |  | 17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah orang yang mendapatkan makan minuman Rapat/pertemuan/ tamu    | 24 Kali Rapat | 70,000,000  |  | 84.000.000  | Penyediaan makanan dan minuman                                   |  |
|  |  |  | 18 | Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                  | Luar Daerah   |  |  | Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 37 Kali       | 320.000.000 |  | 384.000.000 | Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                  |  |
|  |  |  | 19 | Rapat , Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                | Tanjung Redeb |  |  | Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 150 kali      | 165.000.000 |  | 198.000.000 | Rapat , Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                |  |
|  |  |  | 20 | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran                  | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah Tenaga Administrasi /teknis perkantoran yang tersedia         | 2 Orang       | 85.000.000  |  | 102.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran                  |  |

|           |    |    |    |  |  |   |  |      |  |          |             |                    |             |  |  |
|-----------|----|----|----|--|--|---|--|------|--|----------|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| 2.10.2.10 | 01 | 02 |    |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | - | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal | 85%  | -  | -        | -           | <b>510.000.000</b> |             | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |  |
|           |    |    | 01 |  | -  | - |  |      | Jumlah terpenuhinya mebeleur                                   | 3 set    | 30,000,000  | -                  | 36.000.000  | Pengadaan Mebeleur                                       |  |
|           |    |    | 02 |  | -  | - |  |      | ketersediaan kendaraan dinas operasional                       | 1 unit   | 450,000,000 | -                  | 450,000,000 | Pengadaan Kendaraan Dinas                                |  |
| 2.10.2.10 | 01 | 03 | 03 |  | <b>Program Peningkatan Disiplin aparatur</b>             | - | Terpenuhinya Kapasitas Kompetensi sumber daya aparatur                                 | 100% | -  | 100%     | -           | <b>124,000,000</b> |             | <b>Program Peningkatan Disiplin aparatur</b>             |  |
|           |    |    | 02 |  | -  | - |  |      | jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas/waskat           | 65 orang | 40,000,000  | -                  | 40,000,000  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya          |  |
|           |    |    | 03 |  | -  | - |  |      | jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian kerja lapangan         | 25 Orang | 20,000,000  | -                  | 20,000,000  | Pengadaan pakaian kerja lapangan                         |  |
|           |    |    | 04 |  | -  | - |  |      | Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian Korpri                 | 65 Orang | 40,000,000  | -                  | 40,000,000  | Pengadaan pakaian KORPRI                                 |  |
|           |    |    | 05 |  | -  | - |  |      | jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari/batik | 65 Orang | 24.000.000  | -                  |             | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu              |  |

|           |    |    |    |   |               |  |                   |  |                |             |                    |             |   |  |
|-----------|----|----|----|---|---------------|--|-------------------|--|----------------|-------------|--------------------|-------------|---|--|
| 2.10.2.10 | 01 | 05 |    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | -             | presentasi aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya | 80%               |  |                | -           | <b>350,000,000</b> |             | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |  |
|           |    |    | 01 | -   | -             |  |                   | jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan  | 9 orang        | 100,000,000 | -                  | 100,000,000 | Pendidikan dan pelatihan formal   |  |
|           |    |    | 04 | -   | -             |  |                   | Jumlah pegawai yang mendapat bimtek teknologi informasi  | 20 orang       | 250,000,000 | -                  | 250,000,000 | Bimbingan teknis implementasi teknologi informasi                                     |  |
| 2.10.2.10 | 01 | 06 |    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |               | Tercapainya nilai LKj-IP   | 70 % (Kategori B) |  |                |             | <b>335.000.000</b> |             | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |  |
|           |    |    | 04 | Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun   | Tanjung Redeb |  |                   | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun   | 1 Dokumen      | 75.000.000  |                    | 100.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun   |  |
|           |    |    | 06 | Sosialisasi kinerja program SKPD  | Tanjung Redeb |  |                   | Terlaksananya sosialisasi kinerja SKPD   | 1 kali pameran | 85.000.000  |                    | 102.000.000 | Sosialisasi kinerja program SKPD  |  |
|           |    |    | 09 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD                       | Tanjung Redeb |  |                   | Jumlah Dokumen yang tersusun untuk mendukung pelaksanaan kinerja SKPD (renstra, Renja, Tepra, LKPJ/LPPD, Dan SOP | 5 Dokumen      | 75.000.000  |                    | 100.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD                       |  |
|           |    |    | 10 | Pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang TIK                               | -             |  |                   | jumlah Laporan   | 1 Dokumen      | 50,000,000  | -                  | 50,000,000  | Pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang TIK                               |  |

|           |    |    |    |   |               |   |   |                               |             |                      |             |   |   |
|-----------|----|----|----|---|---------------|---|---|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|---|
|           |    |    | 11 | Bimbingan teknis evaluasi laporan dan pertanggung jawaban capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah |               |   | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis  | 3 Orang                       | 75,000,000  |                      | 75,000,000  | Bimbingan teknis evaluasi laporan dan pertanggung jawaban capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah |   |
|           |    |    | 12 | Monitoring dan Evaluasi   |               | Jumlah Laporan Monev  |   | 1 Dokumen                     | 100.000.000 |                      | 125.000.000 | Monitoring dan Evaluasi   |   |
| 2.15.2.10 | 01 | 15 |    | <b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</b>               |               | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi | 30%   |                               |             | <b>1,800,000,000</b> |             | <b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</b>               |   |
|           |    |    | 02 | Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi                                      | Tanjung Redeb |   | tersediannya akses internet dan Jaringan komunikasi sandi serta tersediannya tenaga pengelola | 14 Perangkat Daerah/ 30 orang | 400,000,000 |                      | 400,000,000 | Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi                                      |   |
|           |    |    | 03 | Penyelenggaraan sosialisasi/Bimtek/diklat bidang persandian dan keamanan informasi                      | Tanjung Redeb |   | Jumlah aparatur pemda yang mengikuti sosialisasi/bimtek/diklat                                | 60 Orang                      | 200,000,000 | -                    | 200,000,000 | Penyelenggaraan sosialisasi/Bimtek/diklat bidang persandian dan keamanan informasi                      |   |
|           |    |    | 04 | Penyediaan peralatan/sistem persandian dan keamanan informasi   | Kab. Berau    |   | Jumlah peralatan sandi dan keamanan informasi   | 10 Unit dan 3 Aplikasi        | 700,000,000 | -                    | 700,000,000 | Penyediaan peralatan/sistem persandian dan keamanan informasi   |   |
|           |    |    | 05 | Pengelolaan dan Pengembangan Security Operation Center ( SOC)   | Tanjung Redeb | Terlaksananya pusat pengawasan, pencegahan dan pengamanan lalu lintas data, informasi dan Komunikasi    | 30%   | Tersediannya Dashboard SOC    | 30%         | 500,000,000          |             | 500,000,000   | Pengelolaan dan Pengembangan Security Operation Center ( SOC) |

|           |    |    |    |   |               |  |     |   |               |               |               |               |   |  |
|-----------|----|----|----|---|---------------|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 2.10.2.10 | 01 | 15 | 02 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa                   | Kab. Berau    | Jumlah Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet | 80% |   |               |               | 9.523.120.000 |               | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa                   |  |
|           |    |    |    | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi                |               | Kapasitas akses internet perangkat daerah              |     |   |               |               |               |               | 90 mbps   |  |
|           |    |    | 05 | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi                                | Tanjung Redeb |  |     | terwujudnya penyelenggaraan e-government  | 2 Aplikasi    | 400.000.000   |               | 480.000.000   | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi                                |  |
|           |    |    | 15 | Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau       | Kab. Berau    |  |     | Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM   | 5 Kecamatan   | 250.000.000   |               | 250.000.000   | Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Kabupaten Berau       |  |
|           |    |    | 16 | Peningkatan Komunikasi dan nformasi melalui Media radio dan Televisi Daerah | Tanjung Redeb |  |     | Terpeliharanya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi melalui media radio RSPD dan televisi daerah | 1 Paket       | 1,500,000,000 | -             | 1,500,000,000 | Peningkatan Komunikasi dan nformasi melalui Media radio dan Televisi Daerah |  |
|           |    |    | 17 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi             | Tanjung Redeb |  |     | Jumlah aparatur yang terlatih   | 25 Orang      | 250,000,000   | -             | 250,000,000   | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi             |  |
|           |    |    | 18 | Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik                                  | Kab. Berau    |  |     | Laporan Monitoring  | 1 Laporan/dok | 150,000,000   | -             | 195.000.000   | Forum Komunikasi dan Monitoring Publik                                      |  |
|           |    |    | 19 | Pengadaan alat dan Studio Komunikasi BTv dan RSPD                           | Tanjung Redeb |  |     | jumlah peralatan dan studio penyiaran BTv dan RSPD  | 1 Paket       | 1,200,000,000 | -             | 1,200,000,000 | Pengadaan alat dan Studio Komunikasi BTv dan RSPD                           |  |

|  |  |  |    |  |               |  |  |  |                |               |   |               |  |
|--|--|--|----|--|---------------|--|--|--|----------------|---------------|---|---------------|--|
|  |  |  | 20 | Optimalisasi Pengelolaan Web Pemerintah Kabupaten Berau              | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah website yang dikelola   | 1 Website      | 750,000,000   | - | 750.000.000   | Optimalisasi Pengelolaan Web Pemerintah Kabupaten Berau              |
|  |  |  | 21 | Pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat             | Tanjung Redeb |  |  | Terlaksananya Layanan Pengaduan dan Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dan dikelola pemerintah Daerah melalui Website milik pemerintah kab. Berau, layanan jaringan Online, Aplikasi PARAS Online Berau. | 100%           | 420,000,000   | - | 504.000.000   | Pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat             |
|  |  |  | 22 | Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa                         | Kab. Berau    |  |  | terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah  | 100%           | 1,500,000,000 | - | 2,500,000,000 | Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa                         |
|  |  |  | 23 | Pembinaan dan Pengembangan E-Government Berbasis Teknologi Informasi | Tanjung Redeb |  |  | Tersusunnya Masterplan Smart City dan Pelaksanaannya   | 1 Dokumen      | 100,000,000   |   | 120.000.000   | Pembinaan dan Pengembangan E-Government Berbasis Teknologi Informasi |
|  |  |  | 24 | Peningkatan sistem keamanan data dan informasi                       | Tanjung Redeb |  |  | Tersedianya sistem keamanan data dan informasi   | 10 Sistem      | 500,000,000   | - | 520.000.000   | Peningkatan sistem keamanan data dan informasi                       |
|  |  |  | 25 | Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)                     | Tanjung Redeb |  |  | jumlah dokumen informasi publik seluruh perangkat daerah yang harus di informasikan  | 1081 Dokumen   | 1,100,000,000 |   | 1,100,000,000 | Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)                     |
|  |  |  | 26 | Pengelolaan media sosial   | Tanjung Redeb |  |  | Jumlah Pengelolaan media sosial pemerintah kabupaten   | 3 Media Sosial | 800,000,000   |   | 825.000.000   | Pengelolaan media sosial   |

|           |    |    |    |  |               |   |     |  |                  |             |                      |             |  |
|-----------|----|----|----|--|---------------|---|-----|--|------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| 2.10.2.10 | 01 | 16 |    | <b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>   | -             | Tersusunnya kajian bidang teknologi dan informatika                           | 20% | -  | -                | -           | <b>1,150,000,000</b> |             | <b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>   |
|           |    |    | 01 | pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi                  | -             |   |     | Jumlah kajian  | 1 Dokumen Kajian | 500,000,000 | -                    | 500,000,000 | pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi                  |
|           |    |    | 02 | Pengumpulan data dan informasi daerah                                      | -             |   |     | jumlah dokumen /OPD  | 47 OPD           | 350.000.000 | -                    | 420.000.000 | Pengumpulan data dan informasi daerah                                      |
|           |    |    | 03 | Rapat koordinasi dan evaluasi informasi daerah                             | Tanjung Redeb |   |     | jumlah koordinasi dan evaluasi                                     | 2 Kali           | 300,000,000 | -                    | 300,000,000 | rapat koordinasi dan evaluasi informasi daerah                             |
| 2.10.2.10 | 01 | 17 |    | <b>Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika</b> | -             | Presentase jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang memenuhi standar | 58% | -  | -                | -           | <b>750,000,000</b>   |             | <b>Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika</b> |
|           |    |    | 01 | Pelatihn SDM dalam bidang komunikasi dan informasi                         |               |   |     | Jumlah orang yang dilatih  | 8 Orang          | 350,000,000 |                      | 350,000,000 | Pelatihn SDM dalam bidang komunikasi dan informasi                         |
|           |    |    | 02 | Pembelajaran teknologi informasi bagi aparatur dan masyarakat              | -             |   |     | jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil dalam memanfaatkan TI | 190 Orang        | 400,000,000 | -                    | 500,000,000 | Pembelajaran teknologi informasi bagi aparatur dan masyarakat              |

|           |    |    |    |  |  |               |  |     |  |           |  |                       |               |   |  |
|-----------|----|----|----|--|--|---------------|--|-----|--|-----------|--|-----------------------|---------------|---|--|
| 2.10.2.10 | 01 | 18 |    |  | <b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>          |               | Persentase Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio, Televisi Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 95% |  |           |  | <b>1,500,000,000</b>  |               | <b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>         |  |
|           |    |    | 02 |  | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   | Tanjung Redeb |  |     | jumlah expo yang di ikuti/bako humas                                   | 5 Event   |  | 1,500,000,000         | 1,500,000,000 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  |  |
| 2.10.2.10 | 01 | 20 |    |  | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>  |               | Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                               | 83% |  |           |  | <b>10.098.600.000</b> |               | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b> |  |
|           |    |    | 01 |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika        | Tanjung Redeb |  |     | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika OPD            | 34 OPD    |  | 500.000.000           | 625.000.000   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika       |  |
|           |    |    | 02 |  | Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika                | Kab. Berau    |  |     | Tersedianya Infrastruktur Jaringan secara merata pada Perangkat Daerah | 9 Kampung |  | 9.598.600.000         | 9.598.600.000 | Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika               |  |
| 2.10.2.10 | 01 | 21 |    |  | <b>Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah</b> |               | Persentase tingkat ketersediaan Data /Informasi/ Statistik Sektoral untuk perencanaan pembangunan                | 30% |  |           |  | <b>1,000,000,000</b>  |               | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b> |  |

|           |    |    |    |   |                  |   |                   |  |                   |             |                       |             |  |
|-----------|----|----|----|---|------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|
|           |    |    | 01 | Pengumpulan ,<br>pengolahan, analisis,<br>dan diseminasi data<br>statistik sektoral         | Kab.<br>Berau    |   |                   | Jumlah Dokumen<br>Statistik  | 5 Dokumen         | 550,000,000 |                       | 660.000.000 | Pengumpulan ,<br>pengolahan,<br>analisis, dan<br>diseminasi data<br>statistik sektoral         |
|           |    |    | 02 | Penyediaan peralatan<br>infrastruktur<br>pengolahan<br>data/informasi statistik<br>sektoral | Tanjung<br>Redeb |   |                   | Jumlah peralatan<br>dan sistem<br>pengolah data dan<br>informasi statistik<br>sektoral | 1 unit / 1 sistem | 250,000,000 | -                     | 325.000.000 | Penyediaan<br>peralatan<br>infrastruktur<br>pengolahan<br>data/informasi<br>statistik sektoral |
|           |    |    | 03 | Pengembangan<br>sumber daya manusia<br>bidang statistik                                     | Tanjung<br>Redeb |   |                   | Jumlah sumber<br>daya manusia yang<br>mengelola statistik<br>pada Perangkat<br>Daerah  | 60 Orang          | 200,000,000 | -                     | 300.000.000 | Pengembangan<br>sumber daya<br>manusia bidang<br>statistik                                     |
| 2.10.2.10 | 01 | 19 |    | <b>Program<br/>Pemberdayaan<br/>Teknologi dan<br/>Komunikasi</b>                            |                  | <b>Terlaksananya<br/>tata kelola<br/>teknologi<br/>informasi dan<br/>komunikasi<br/>yang sesuai<br/>standar</b> | 1<br>Standarisasi |  |                   |             | <b>540,000,000</b>    |             | <b>Program<br/>Pemberdayaan<br/>Teknologi dan<br/>Komunikasi</b>                               |
|           |    |    | 01 | Penerapan tata kelola<br>TIK Pemerintah   | Tanjung<br>Redeb |   |                   | terciptanya<br>peningkatan SDM<br>dibidang teknologi<br>informasi yang<br>berkualitas  | 20 Orang          | 360,000,000 |                       | 432.000.000 | Penerapan tata<br>kelola TIK<br>Pemerintah   |
|           |    |    | 02 | Standarisasi sistem<br>informasi dan Muatan<br>TIK Perangkat Daerah                         | Tanjung<br>Redeb |   |                   | jumlah dokumen<br>standarisasi   | 1 Dokumen         | 180,000,000 |                       | 216.000.000 | Standarisasi sistem<br>informasi dan<br>Matan TIK<br>Perangkat Daerah                          |
|           |    |    |    |   |                  |   |                   |  |                   |             | <b>32.218.720.000</b> |             |  |

**Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Berau  
Kepala,**

**Drs. SUSILA HARJAKA**  
Pembina Utama Muda / IVc  
*Niz.19620526198803 1 006*

